

PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI

Sartono¹, *Ali Afif², Febriati³, Jaurino⁴

^{1, 2, 3, 4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti
email: sartono@upb.ac.id¹, *ali.afif@upb.ac.id², febriati@upb.ac.id³, jaurino@upb.ac.id⁴

Abstrak

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) adalah personil yang direkrut dan diangkat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. PPKL harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi, keterampilan berkomunikasi, serta kemampuan untuk meyakinkan anggota koperasi dan masyarakat agar mau berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesepakatan bersama. PPKL memiliki latar belakang yang beragam baik dari segi pendidikan formal maupun pengalaman, sehingga pemahaman mereka terhadap koperasi juga beragam. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya, diperlukan kegiatan penguatan kapasitas dalam bentuk kegiatan *Capacity Building* bagi tenaga PPKL. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan ini melibatkan pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal dengan materi pengantar, materi inti, dan materi pendukung. Hasil yang di harapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya kompetensi PPKL khususnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam rangka persiapan penerapan efektif tahun 2025. Hasil kegiatan tercapainya indikator kinerja PPKL melalui penetapan tujuan yang lebih jelas dan terukur, pelaksanaan bimbingan dan pendampingan yang lebih efektif, serta pelaporan hasil kerja yang lebih baik. Konsultasi serta Bimbingan Lanjutan via whatsapp serta kegiatan penguatan kapasitas ini diikuti dengan kegiatan Konsultasi Manajemen Koperasi.

Kata Kunci: Petugas_Penyuluh_Koperasi; PPKL; Koperasi_dan_UKM; Kompetensi; Skill

Abstract

Field Cooperative Extension Officers (PPKL) are personnel recruited and appointed by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. PPKL must have competencies that are in accordance with the demands of their work, including knowledge and understanding of cooperatives, communication skills, and the ability to convince cooperative members and the community to want to change for the better in accordance with mutual agreement. PPKL has diverse backgrounds both in terms of formal education and experience, so their understanding of cooperatives is also diverse. To improve the effectiveness of the implementation of its duties, capacity building activities are needed in the form of Capacity Building activities for PPKL personnel. The method used to achieve the objectives of this activity involves classically implemented training with introductory materials, core materials, and supporting materials. The expected result of this activity is the formation of PP competencies.

Keywords: Cooperative Extension Worker; PPKL; Cooperatives and SMEs; Competence; Skills

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian) Pasal 3, peran ekonomi koperasi diuraikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, khususnya, dan masyarakat umumnya. Seiring dengan itu, koperasi juga berkontribusi dalam pembentukan tatanan ekonomi nasional, bertujuan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diterbitkannya UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia, n.d.) dan PP 7/2021 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, n.d.) memberikan Koperasi banyak keistimewaan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. "Koperasi bersama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terus dikedepankan sebagai pilar perekonomian bangsa.

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), yang memainkan peran penting (Ondang et al., 2019) karena kendala dalam sumber daya manusia di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di tingkat pusat, serta di Dinas yang mengawasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diangkat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, PPKL diberi tugas khusus untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan koperasi di seluruh nusantara. Urgensi peran ini semakin bertambah oleh dinamika Pemerintahan Daerah yang menyebabkan pergantian pegawai yang tinggi dan kelangkaan sumber daya manusia profesional dalam bimbingan koperasi, yang memahami karakteristik organisasi koperasi dan strategi untuk menggerakkan perubahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Tugas pokok dan fungsi utama PPKL (Indriani, 2023) mencakup penyuluhan kepada koperasi, termasuk kegiatan pendataan dan pendampingan kepada individu yang berminat mendirikan atau bergabung dengan koperasi. Selain itu, PPKL bertanggung jawab membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk entitas pemerintah di wilayah masing-masing, untuk merumuskan tujuan dan target pengembangan koperasi. Peran dan fungsi yang kompleks PPKL melibatkan beberapa aspek, seperti berperan sebagai komunikator, enumerator (pelaksana pendataan), motivator, mentor, dan mediator atau kolaborator.

1. komunikator, dalam hal ini PPKL memberikan informasi kepada Koperasi dan sebaliknya mendapatkan informasi dari koperasi binaannya untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pembinaan.
2. Enumerator yaitu melaksanakan pendataan Koperasi, dalam upaya membangun database koperasi binaannya, dan lebih jauh dapat digabungkan menjadi data base koperasi wilayah binaan hingga tingkat nasional. Data base yang terbangun akan menjadi sumber data yang akurat dan update, dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembinaan koperasi.
3. Motivator, PPKL harus dapat memotivasi Pengurus, Pengawas, Pengelola, Anggota dan masyarakat untuk berkoperasi dengan baik dan benar.
4. Mentor, PPKL harus dapat berperan sebagai pendamping perkoperasian dan gerakan masyarakat berkoperasi, menjadi mentor dalam pembenahan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi.
5. Mediator atau Collaborator, dalam hal ini PPKL harus dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara Koperasi dengan para pemangku kepentingannya.

PPKL diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada koperasi, melakukan pendataan sistematis, memotivasi para pihak yang terlibat dalam koperasi, berperan sebagai mentor dalam pengembangan kelembagaan koperasi, dan memfasilitasi komunikasi antara koperasi dengan pemangku kepentingan (Amalia et al., 2023). Ketika mempertimbangkan peran dan fungsi PPKL yang kompleks dalam hubungannya dengan indikator evaluasi kinerja, yang melibatkan manajemen keuangan koperasi hingga pendataan koperasi, perumusan rencana kerja, bimbingan dan pendampingan koperasi, penyuluhan kepada masyarakat, inventarisasi potensi pengembangan wilayah, publikasi kegiatan penyuluhan koperasi, identifikasi investasi ilegal yang menyamar sebagai koperasi, dan penilaian tambahan dari koordinator PPKL, terlihat bahwa tanggung jawab PPKL melibatkan tugas-tugas yang beragam yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip koperasi, keterampilan manajerial, komunikasi yang efektif, dan keterampilan pemecahan masalah (Anisykurlillah et al., 2019). Dengan adanya kegiatan ini bertujuan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen keuangan koperasi kepada PPKL sekaligus sesi diskusi untuk mengetahui lebih lanjut kendala yang di hadapi PPKL serta diberikan solusi atas kendala yang dihadapi.

METODE

Metode Pelaksanaan di mulai dari :

1. Rekrutmen Peserta. Peserta capacity building ini adalah PPKL Metode rekrutmen peserta capacity building yang digunakan adalah dengan koordinasi melalui mitra yakni Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penetapan materi Capacity Building, dilakukan melalui pendalaman Bersama Mitra yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, yang salah satunya didasarkan pada data dan informasi yang dihimpun terkait dengan kendala pelaksanaan tugas PPKL yang ditempatkan, mencakup:

- a. Keterampilan mengidentifikasi masalah dan penetapan tujuan pembinaan dan dampingan
 - b. Keterampilan berkomunikasi secara efektif;
 - c. Strategi membangun sinergi dari berbagai potensi pengembangan koperasi;
 - d. Penetapan Program dan target pembinaan dan pendampingan.
3. Penyampaian materi dilakukan melalui :
 - a. Penyampaian materi secara klasikal di kelas;
 - b. Konsultasi dan Bimbingan Lanjutan via Whatsapp

Mitra kegiatan PKM ini Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat berperan aktif dalam memberikan informasi sekaligus sebagai narasumber berkolaborasi dengan tim PKM kegiatan agar sejalan dengan tujuan yang di harapkan memberikan pengetahuan manajemen keuangan koperasi. Sebagai evaluasi kegiatan, dilaksanakan penyebaran kuesioner kepada peserta untuk menilai hasil dari kegiatan serta masukan untuk kegiatan demi tercapainya transfer pengetahuan yang maksimal secara 2 arah. Program kegiatan ini juga berkelanjutan, tidak hanya pada sesi dikelas namun masih tetap berlanjut di luar sesi melalui layanan diskusi dan konsultasi yang dibuka oleh tim PKM melalui whatsapp, email dan google drive.

Tabel 1 Tahapan Kegiatan PKM

No	Kegiatan	Luaran	Sub Kegiatan
1.	Sosialisasi	Pelatihan Peningkatan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Sosialisasi mengenai standar akuntansi keuangan
2.	Pendampingan	Keterampilan tentang Manajemen Keuangan Koperasi	Pendampingan manajemen keuangan koperasi berdasarkan Estándar Akuntansi Keuangan

Peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya baik mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian dan penugasan mahasiswa yang terpilih sebagai tim pembantu peneliti. Bagi Mahasiswa yang dilibatkan berpotensi rekognisi melalui pendekatan pengakuan nilai tugas mata kuliah Koperasi dan UMKM Adapun uraian dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan atau kebutuhan mitra adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Uraian Tugas Tim Pengusul

Nama Pengusul	Tugas
Ketua Pelaksana : Sartono	Dalam Kegiatan PKM berperan sebagai Ketua tim pengabdian dan mengkoordinir.
Anggota : Ali Afif	Dalam Kegiatan PKM berperan sebagai anggota dan pelaksana tema pelatihan dan pendampingan.
Anggota : Febriati	Dalam Kegiatan PKM berperan sebagai anggota dan pelaksana tema pelatihan
Anggota : Jaurino	Dalam Kegiatan PKM berperan sebagai anggota dan pelaksana tema pendampingan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan keuangan merupakan proses penyajian informasi keuangan yang sistematis dan periodik untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Entitas privat, seperti UMKM, dan Koperasi memiliki kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan entitas publik. Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas

privat. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu entitas privat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan keuangan.

Manajemen keuangan koperasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan keuangan entitas privat dan Meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Hal tersebut dapat memudahkan koperasi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan keuangan, meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan, serta meningkatkan kredibilitas entitas koperasi di mata pihak eksternal.

Adapun bukti kegiatan pada saat penyampaian materi dan demonstrasi website diantaranya sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan Materi



Gambar 2. Pelaksanaan Materi



Gambar 3. Foto Bersama

Berdasarkan hasil dari kegiatan ini yaitu dari pihak mitra sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini. Secara keseluruhan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Bidang Manajemen Keuangan Koperasi berjalan dengan lancar. Pihak mitra Dinas Koperasi, UKM membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta pendampingan dan sosialisasi. Peserta kegiatan merupakan Kepala Bidang, Pengawas dan Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pontianak, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah salah satu aula yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan barat. Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, maka kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara umum koperasi masih memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EP, keterbatasan sumber daya manusia, literasi pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi masih rendah dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EP.
2. Kegiatan ini sangat membantu pelaku koperasi khususnya bendahara dalam membuat laporan keuangan koperasi yang transparan dan akuntabel.
3. Kegiatan ini juga menambah pengetahuan dan wawasan dari ketua dan bendahara koperasi. Bahwa dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan mudah dipahami menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
4. Saran untuk pengabdian berikutnya dapat menambahkan jumlah responden yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua civitas akademik Universitas Panca Bhakti dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan serta support kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat serta tidak lupa kepada mitra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan semua pelatihan guna meningkatkan kualitas produk serta penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Amiludin, & Aditya, T. (2023). Strategi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi Banten Terhadap Eksistensi Digitalisasi Koperasi Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1).
- Anisykurlillah, I., Rezqika, B., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sak Etap Pada Umkm Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. In *JRKA* (Vol. 5).
- Fanani, R. I., Aknuranda, I., & Mursityo, Y. T. (2023). Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Kabupaten Meranti Koperasi Financial Statements Training Based On SAK EP In Meranti Recency. *Community Engagement & Emergence Journal*, 4.
- Indriani, Y. (2023). Capacity Building Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (Program Perkuatan Bagi PPKL yang Ditugaskan di Provinsi Jawa Barat). *E-Coops-Day*, 1(1), 37–41.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Eksekutif*, 3(3).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 4, Pub. L. No. 4 (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (n.d.).
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2021).
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat, Ikatan Akuntan Indonesia (2015).

- Tentang Perkoperasian, Pub. L. No. 25 (1992).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (n.d.).
- Akbar, S. (2017). *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Tematik*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Fardiana, I. U. (2014). *Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis integrasi sains dan Islam pada kelas IV Tahun 2014 Mamba'ul Huda Ngabar Ponorogo*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Pujiastuti, N. F. A. dan E. (2016). Kemampuan Berpikir Kritis dan Rasa Ingin Tahu melalui Model PBL. In *Seminar nasional Matematika X Universitas Negeri Semarang* (p. 525). Semarang.
- Rimiene, V. (2002). Assessing and Developing Students' Critical Thinking. *Journal of Psychology Learning and Teaching*, 2(1), 17.